

1. Pembahasan: jawaban D. Hal yang dilakukan oleh Kur dan Ine merupakan implementasi kebhinekaan guna menumbuhkan toleransi yang tinggi antarkebudayaan. Sikap saling menghargai antargolongan, mengenali, dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap suku mempunyai rasa simpati, apresiasi dan aktualisasi diri satu sama lainnya (sumber: e-modul Kemendikbud "PKN: Kebhinekaan Bangsa Indonesia").
2. Pembahasan: jawaban C. Kasus diatas tidak akan terjadi apabila pemilik hajat mengesampingkan kepentingan/urusan pribadi diatas kepentingan dan keselamatan/kemaslahatan umum. Apa yang menjadi kepentingan pribadi yakni menggelar pernikahan di masa pandemi yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang, lebih parahnya jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Kemaslahatan umum apa yang dikesampingkan? upaya bersama negara dan masyarakat dalam memutus mata rantai penularan Covid-19, sedangkan dalam soal itu bertentangan dengan sila 3. Konteksnya, disini negara sedang menghadapi AGHT berupa gangguan nasional yakni pandemi Covid-19). Hal ini dikuatkan dengan pernyataan publik Menhan RI Prabowo, sebagai warga negara yang baik kita dituntut membela negara ini dengan cara berdiam diri di rumah, menerapkan disiplin protokol kesehatan dan menunda acara yang mengundang kerumunan untuk menjaga keselamatan diri, orang terdekat kita dan pada lingkup luasnya negara (membantu negara dan pemerintah memutus mata rantai penularan Covid-19).
Jika ditelaah melalui teori akademisi, Yudi Latif dalam bukunya Wawasan Pancasila menyatakan bahwa menempatkan kemaslahatan umum (*bonum commune*) di atas kepentingan lainnya adalah sebuah bentuk nyata dari patriotisme. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat mementingkan diri sendiri akan menyebabkan kemudharatan, mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga dan menjalar ke lingkup yang lebih luas, yaitu bangsa dan negara. Dalam soal itu menimbulkan kemudharatan (meninggalnya keluarga mepelai akibat terinfeksi Covid-19) .
3. Pembahasan: jawaban E. Tindakan kelompok radikal tersebut di tengah pandemi Covid-19, dengan menyebar narasi bahwa pemerintah tidak mampu menangani pandemi Covid-19 karena tidak dianutnya sistem khilafah adalah melanggar sila ketiga dan keempat. Dalam soal terdapat clue/kata kunci yakni antipemerintah (mengkritik

keras dan memandang sentimen negatif dan memojokkan serta menganggap pemerintah gagal atas segala kebijakan pandemi) dan adanya keinginan menggantinya dengan sistem khilafah (memaksakan kehendak dalam cara hidup bernegara), yang mana secara implisit ingin mengganti hasil kesepakatan dan perjanjian luhur bangsa (Pancasila).

Jika dianalisis dengan butir Pancasila, tindakan kelompok ini melanggar butir pertama sila keempat (memaksakan kehendak kepada orang lain) dan butir pertama sila ketiga (tidak menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan) . Seharusnya sebagai warga negara yang Pancasilais, di tengah pandemi ini, kita harus senantiasa mendukung setiap kepentingan negara, di atas kepentingan golongan), bukannya menyebar narasi kebencian dan sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintah, yang dapat berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kebencian publik kepada pemerintah. Kenapa tidak sila pertama, ada clue mengatasnamakan agama?. Meskipun kelompok radikal ini membawa nama agama, bukan berarti ini menunjukkan mereka memaksakan agama yang dianut, karena mereka meyakini ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan ingin menggantinya dengan sistem khilafah. Dikuatkan juga bahwa tindakan mereka memang berpotensi menimbulkan kegaduhan, kebencian dan narasi keliru (hoax, antipemerintah dan anti-Pancasila) .

4. Pembahasan: jawaban E. Opsi A melanggar sila 5 (pasal tentang hak milik pribadi), opsi B sila 5 (dan pasalnya keliru karena pasal 28 B ayat 2 terkait hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi), lalu opsi C sila 5 (pasal tentang hak jaminan sosial), dan opsi D sila 4 (pasal tentang hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan). Sedangkan opsi E melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, butir tidak bertindak sewenang-wenang . Pun pasal 28 B ayat 2 juga mengandung konteks HAM terkait hak mendapatkan perlindungan, hak terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Kasus di opsi E merupakan contoh implementasi negatif atasan ke bawahan yang mengarah pada kekerasan dan pelecehan seksual, baik kepada bawahan perempuan maupun laki-laki. Sederhananya opsi E merupakan tindakan yang tidak beradab/bermoral.
5. Pembahasan: jawaban B. Merujuk pada modul Kemendikbud berjudul "Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat-Daerah", bahwa desentralisasi ialah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah yang menjadi urusan rumah

tangganya, salah satunya urusan kesehatan. Dalam hal penanganan Covid-19, pemerintah daerah diberikan diskresi sehingga lebih leluasa berkreasi dan berinovasi untuk merespon dinamika penanganan pandemi Covid-19 di daerah yang disertai alokasi anggaran pemerintah pusat ke daerah (sumber: Implementasi Otonomi Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 oleh Gusnar Ismail dalam Jurnal Kajian Lemhanas RI).

Materi Bela Negara

6. Pembahasan: jawaban D. Ketika terjadi ancaman radikalisme agama dan terorisme yang mengancam keselamatan dan keutuhan NKRI, maka tindakan kuratif (tindakan ini diambil ketika telah terjadi penyimpangan sosial, dimana tindakan ini ditujukan untuk memberikan kesadaran kepada pelaku penyimpangan). Sesuai dengan program deradikalisasi tahap kedua yakni tahap rehabilitasi dapat berbentuk konseling individu dan pelaksanaan kelas kelompok. Program ini dapat berupa pemberian materi paling sedikit mengenai psikologi, keagamaan, wawasan kebangsaan, serta hukum dan peraturan perundang-undangan (sumber: dikembangkan dan dirujuk dari artikel Proses Deradikalisasi untuk Mencegah Terorisme).
7. Pembahasan: jawaban D. Ini soal gampang-gampang susah, karena perlu penalaran yang mendalam untuk menjawabnya. Konteks kasus yang digambarkan adalah berupa ancaman terorisme, yang mana JAD sudah dinyatakan sebagai organisasi yang berbahaya karena dinaungi organisasi terorisme internasional yang terafiliasi dengan ISIS. Jika Fulan dan Jun ikut dan terlibat dalam agenda utama JAD ini (katakan melakukan teror, aksi bom bunuh diri dan serangan teror lainnya, karena JAD ini menghalalkan untuk menyerang yang dianggap 'kafir'). Jika dianalisis menggunakan sudut pandang pemerintah, maka kasus ini tergolong ancaman militer sesuai dengan penjelasan dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa salah satu bentuk ancaman militer ialah aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Opsi A dan B kurang tepat. Opsi C dan E, kurang tepat karena konteksnya bagi NKRI bukan secara universal/global, sedangkan E terorisme memang termasuk lingkup transnasional (lintas negara), tapi istilah yang lebih tepatnya adalah kejahatan transnasional.

8. Pembahasan: jawaban D. Indikator yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah indikator yang ada pada masing-masing nilai dasar bela negara. Karena yang ditanyakan adalah nilai "setia pada Pancasila," maka pilihlah yang sesuai indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Opsi A, B,C tidak termasuk (opsi B masuk ke indikator nilai kemampuan awal bela negara yaitu mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing). Lalu opsi A (membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing) dan C (berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara masuk ke indikator nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara).

Tersisa opsi D dan E ini termasuk ke indikator nilai setia pada Pancasila. Jika dibedah, opsi E ini masuk ke indikator pertama (menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar), tapi tidak sesuai konteks (di soal konteksnya ranah digital, medsos) . Maka opsi D yang paling sesuai dan memenuhi indikator nilai setia pada Pancasila yakni memahami dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada nilai ketuhanan, ada tuntutan untuk mengamalkan toleransi beragama. Dengan demikian, tindakan yang dicerminkan kasus di opsi D sudah tepat dan efektif, selain disebarkan oleh seorang influencer milenial, efeknya akan menjangkau lingkup luas dan menimbulkan efek domino positif bagi yang melihatnya, apalagi turut menyebarkan. Hal ini dikuatkan dengan argumentasi dari kepala BNPT bahwa cara yang lebih efektif yaitu membanjiri media sosial dengan narasi toleransi dari tokoh-tokoh agama yang memiliki ilmu dan pengaruh kuat di masyarakat (dikembangkan dari modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai Bela Negara dan artikel BNPT berjudul Sebut Ancaman Konten Radikalisme di Masa Pandemi Justru Semakin Tinggi).

9. Pembahasan: jawaban E. Untuk membangun karakter warga negara yang pantang menyerah, rela berkorban bagi bangsa dan negara serta konsisten dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, maka diperlakukan kesamaan pemahaman dari seluruh komponen bangsa terhadap konsepsi bela negara, utamanya mengenai nilai-nilai berikut:

Nilai-nilai dasar bela negara, konsensus dasar berbangsa dan bernegara untuk persatuan dan kesatuan bangsa, konsepsi kebangsaan, integritas moral, etika dan supremasi

hukum, kearifan dan keunggulan lokal untuk kesejahteraan masyarakat (sumber: Modul Wantannas "Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara).

10. Pembahasan: jawaban B. Hal ini diatur dalam Pasal 31 PP 77/2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme) dan dikembangkan dari artikel Proses Deradikalisasi untuk Mencegah Terorisme oleh Arasy Pradana A. Azis).